



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

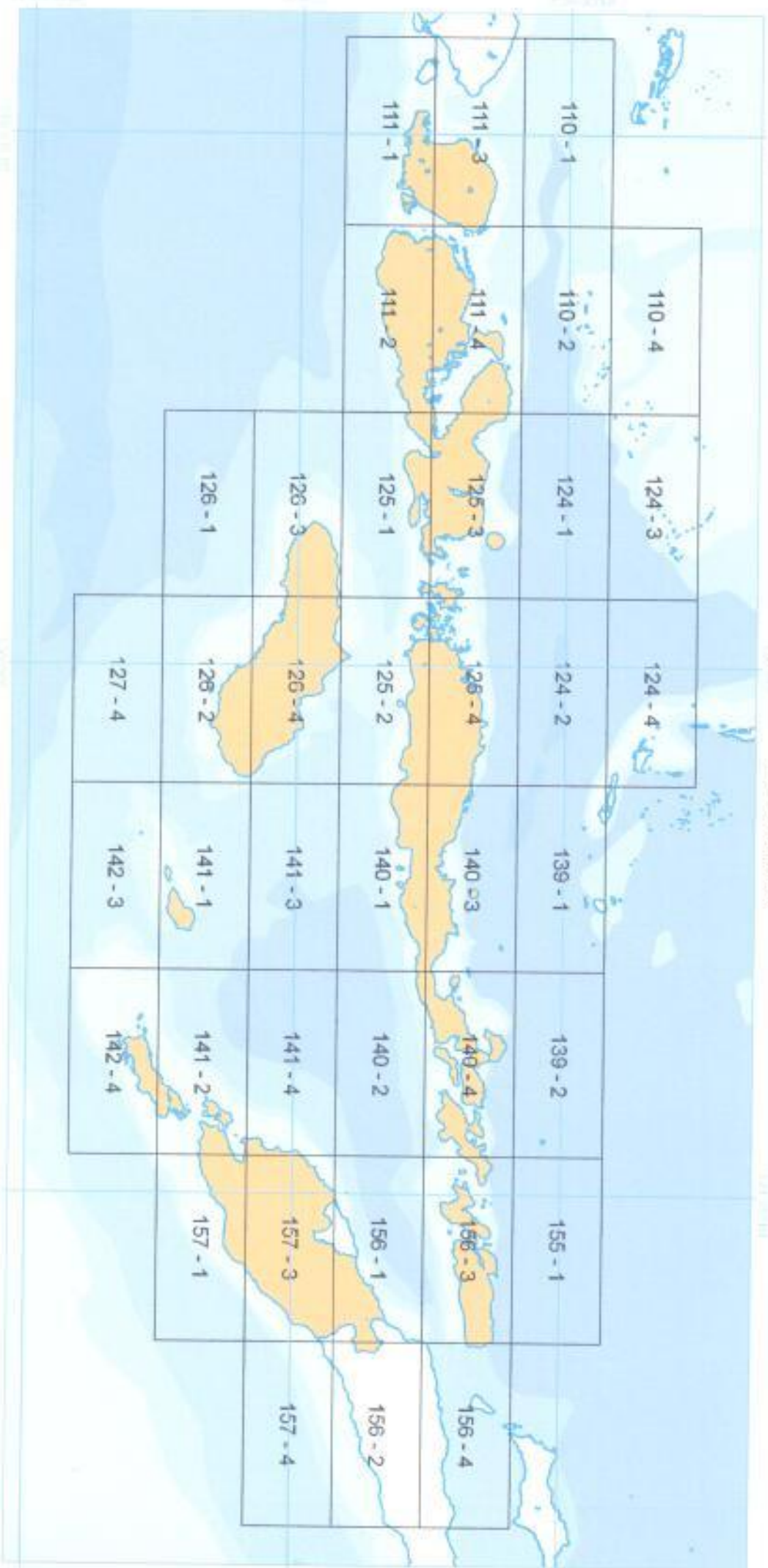
LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA

PETA RENCANA POLA RUANG
KEPULAUAN NUSA TENGGARA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PETA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA KETERANGAN GAMBAR



Sistem Grid : Geografis
Datum Horizontal : WGS 1984

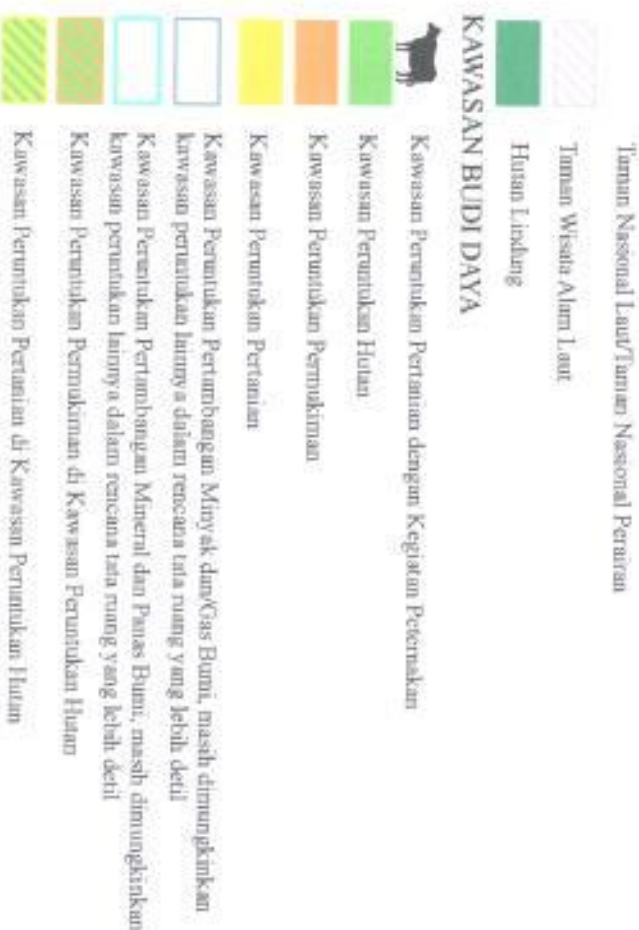
ADMINISTRASI



KAWASAN LINDUNG



KAWASAN BUDI DAYA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA KETERANGAN GAMBAR

SEKTOR UNGGULAN

1 Sektor Unggulan Pariwisata

 Sektor Unggulan Perikanan

KAWASAN ANDALAN DARAT

- 1 Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya
- 2 Kawasan Andalan Bima
- 3 Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya
- 4 Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya
- 5 Kawasan Andalan Maumere - Ende
- 6 Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya
- 7 Kawasan Andalan Ruteng - Bajawa
- 8 Kawasan Andalan Sumba

KAWASAN ANDALAN LAUT

- 1 Kawasan Andalan Laut Selat Lombok
- 2 Kawasan Andalan Laut Flores
- 3 Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya
- 4 Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya

KEDALAMAN LAUT



SUMBER PETA:

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1:250.000, Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2000
- Peta Basis Negeri Kesatuan Republik Indonesia BIG, Tahun 2011
- Peta Batimetri Skala 1:1.000.000, Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, Tahun 2006
- Peta Pemukiman Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTT Skala 1:250.000 Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 423/Kpts. II/1999/Tanggal 15 Juni Tahun 1999
- Peta Kawasan Perikanan, Skala 1:1.000.000, Kementerian Perikanan, Tahun 2009
- Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan (KKPP), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Tahun 2012
- Atlas Sumbawa, Kelautan BIG, Tahun 2006
- Peta Sebaran Kawasan Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2010

KETERANGAN PETA

- Kedalaman Informasi Peta adalah 1:500.000
- Peta ini merupakan gambaran sebagian indikator lokasi pemanfaatan ruang, dan tidak dapat digunakan untuk tujuan serta pemberian izin pemanfaatan ruang
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
- Garis batas internasional mengacu pada Peta Batas NKRI BIG, Tahun 2011
- Hasil Kajian Tim Teknis RTR Pulau dan Hasil Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (JETRW-N)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 110 - 1

LAUT BALI

1



II - 110 - 2





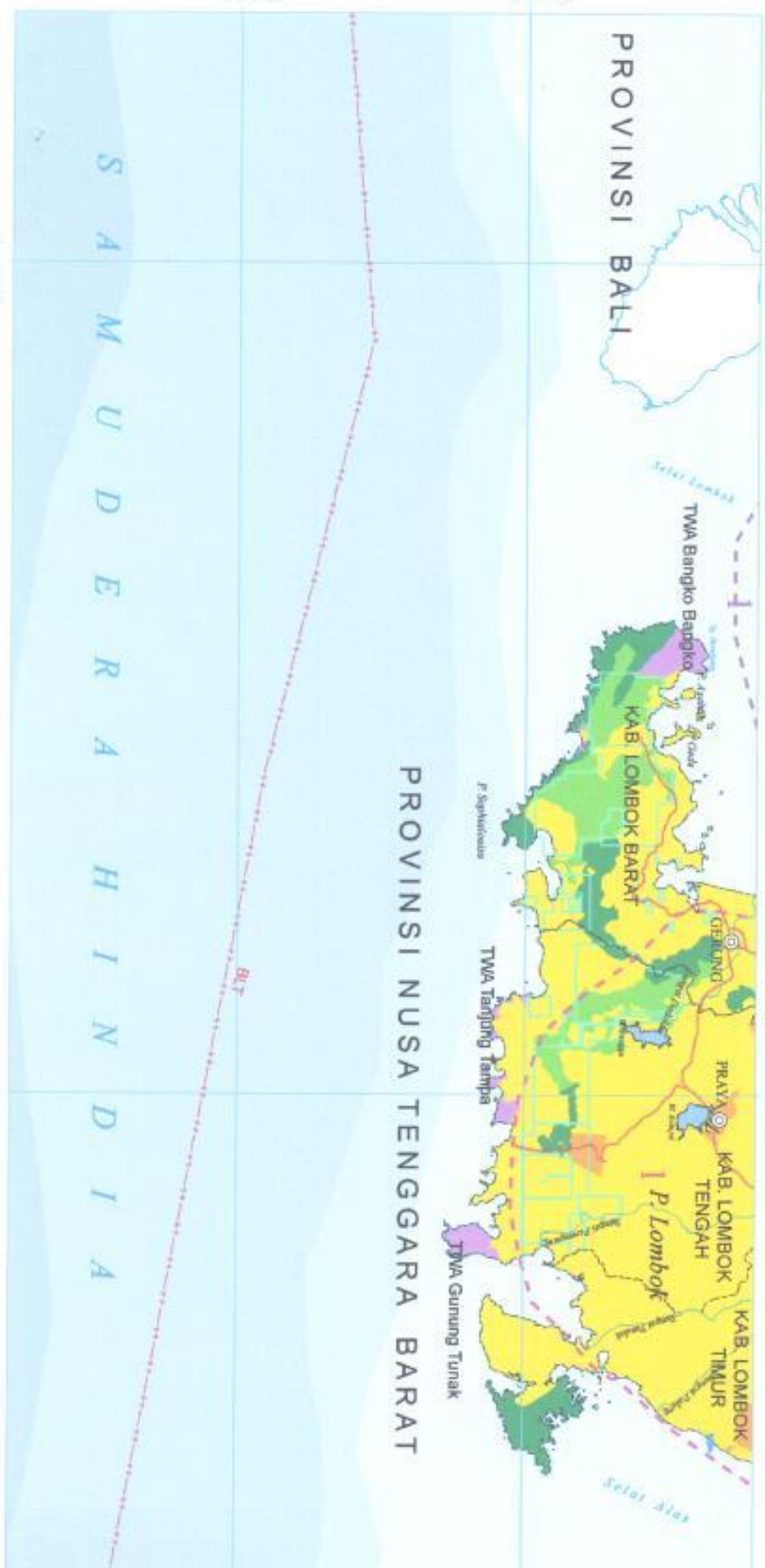
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 110 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

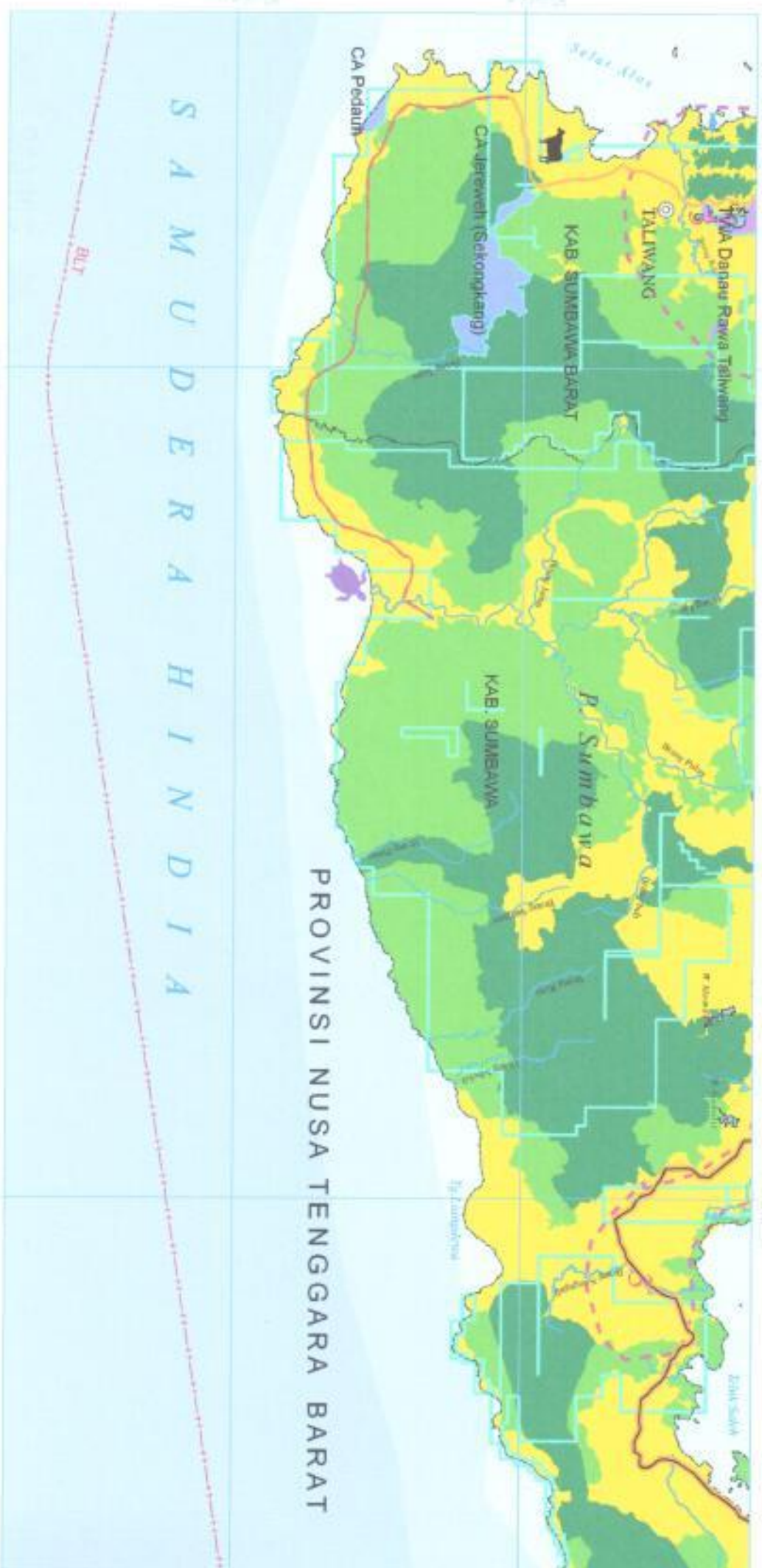
III - 111 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 111-2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 111 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 111-4



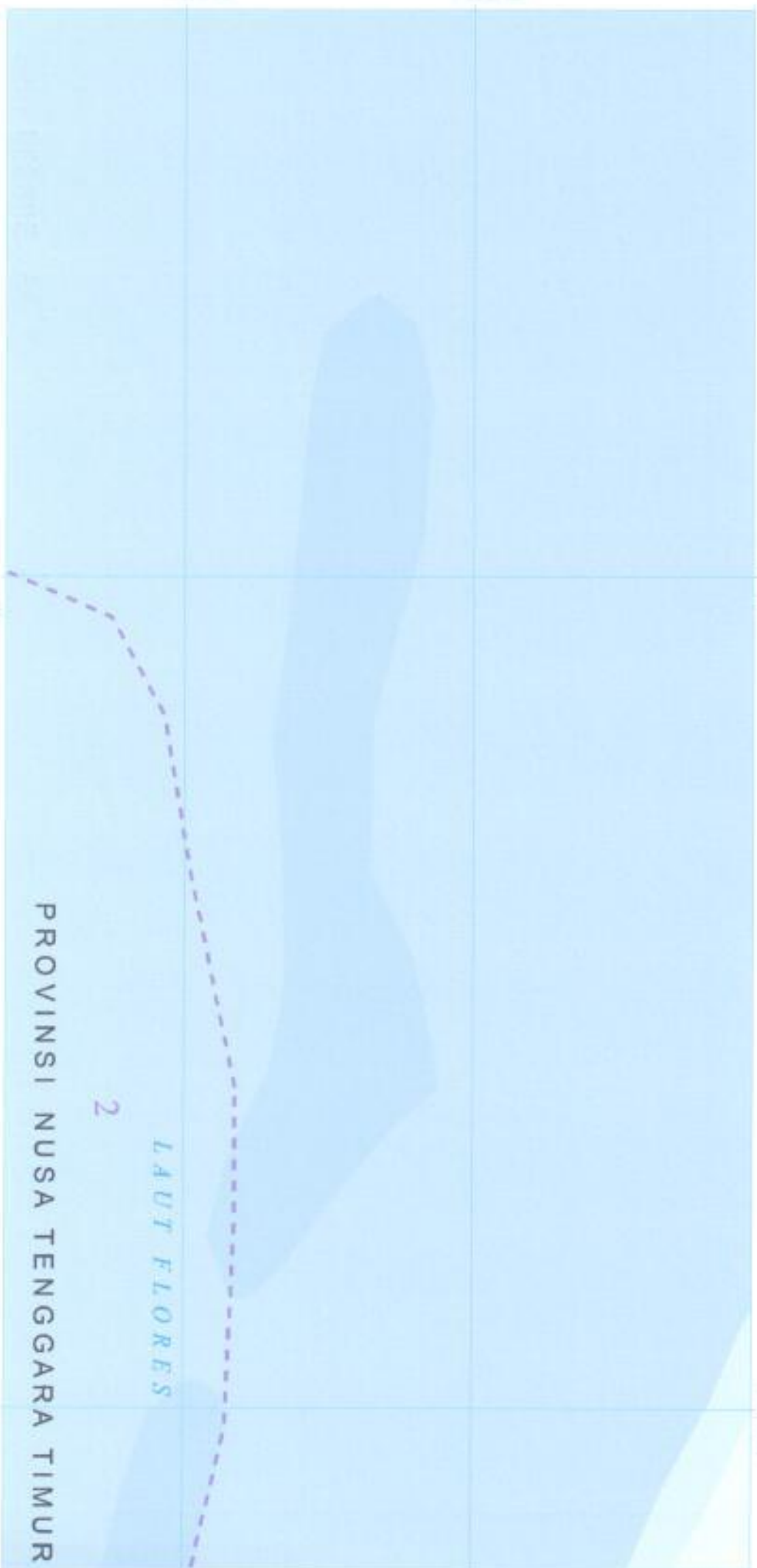


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 124 - 1

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 124 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 124 - 3





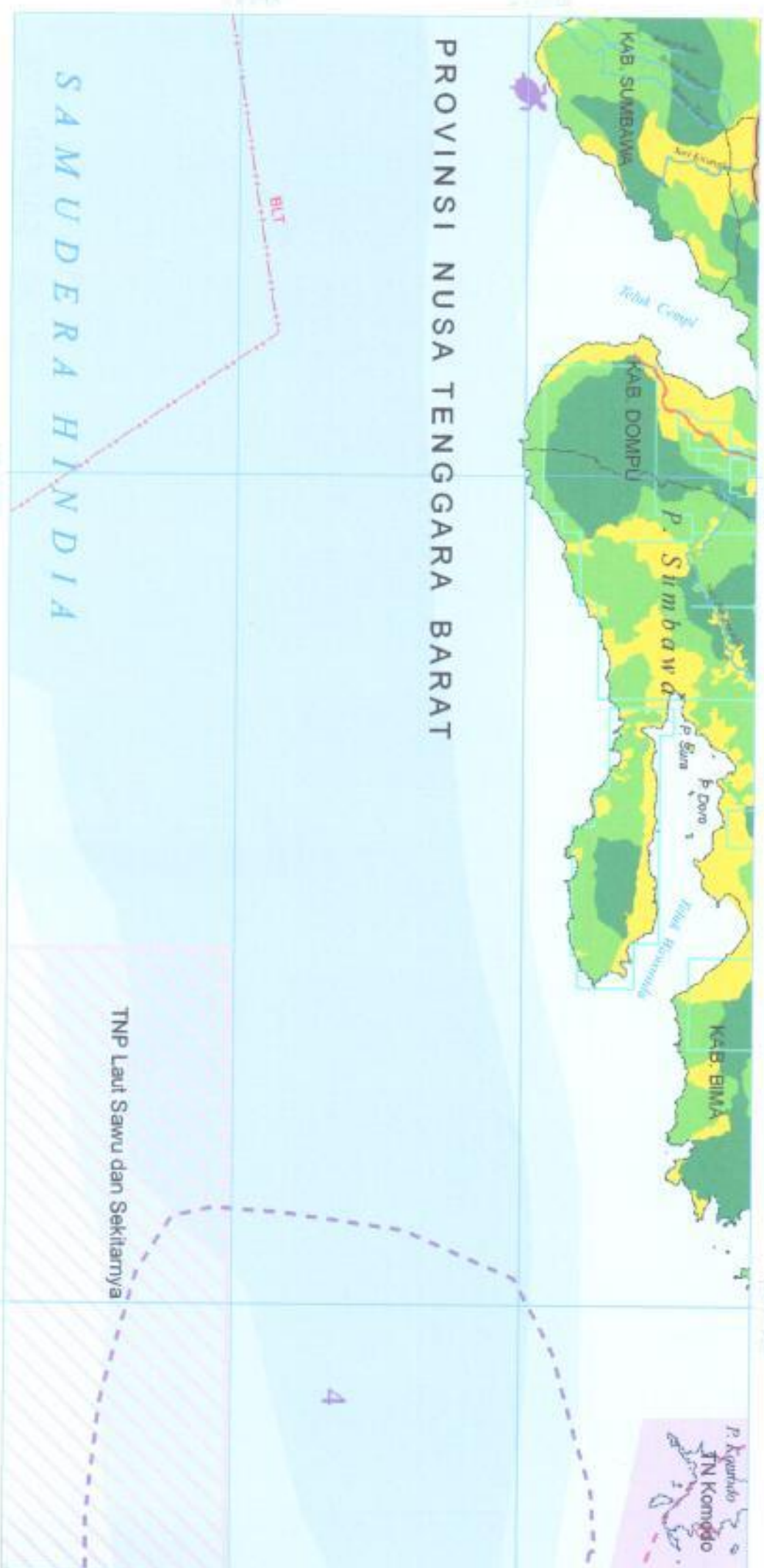
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 124 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 125 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 125 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

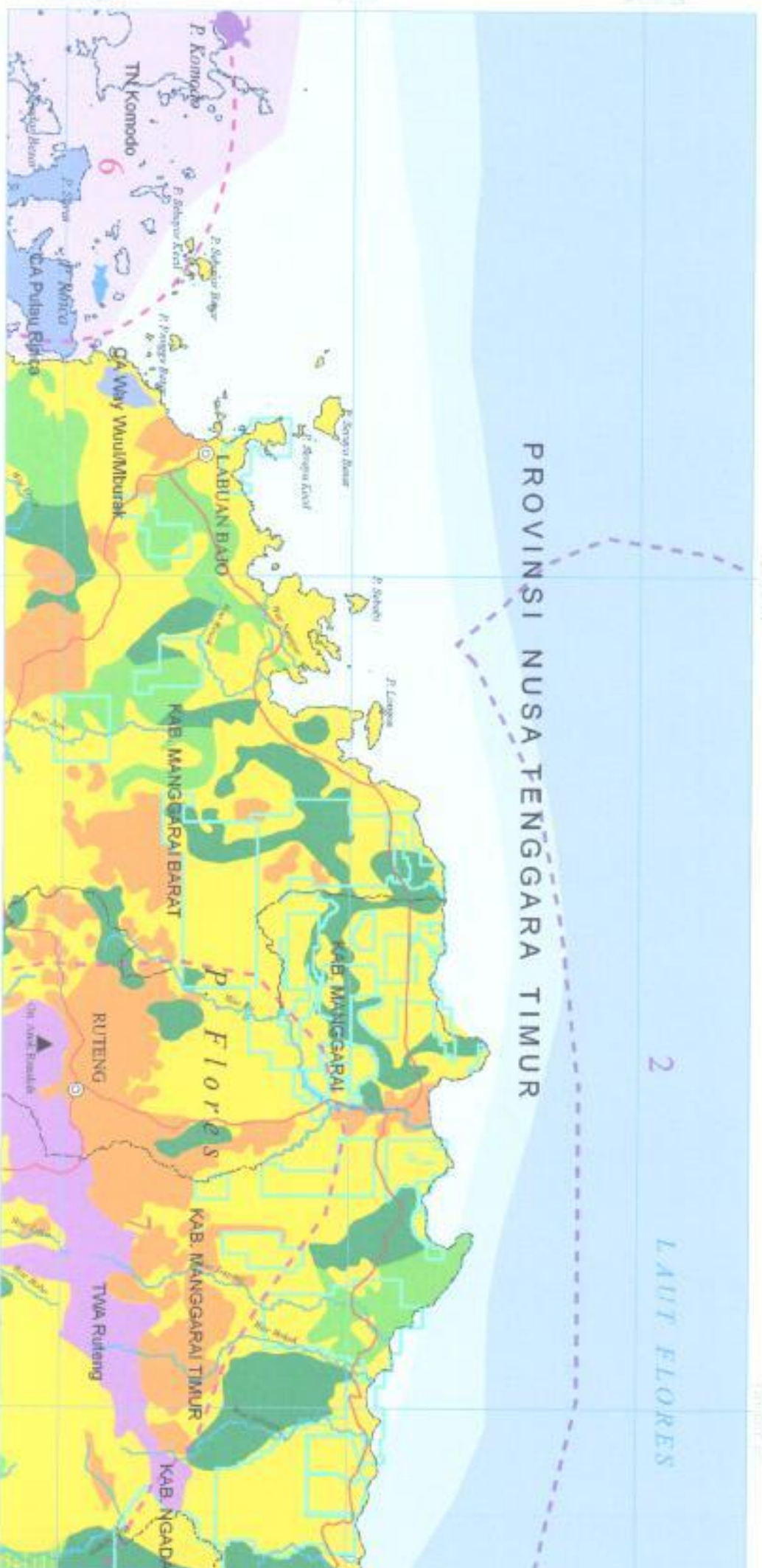
II - 125 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 125 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 126 - 1

SAMUDERA HINDIA





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 126 - 2





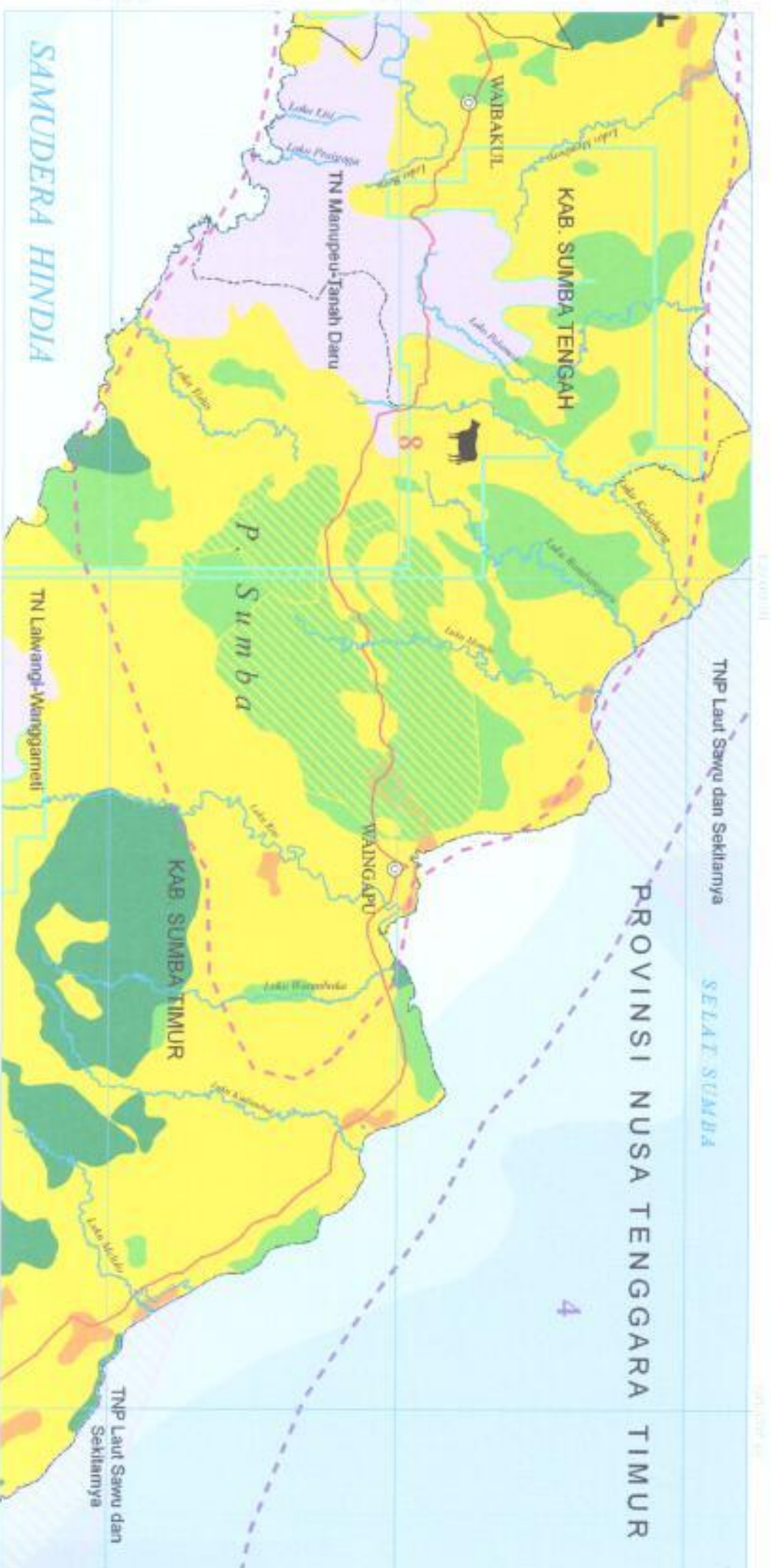
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 126 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 126 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 127 - 4

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TNP Laut Sawu dan Sekitarnya

BLT

SAMUDERA HINDIA



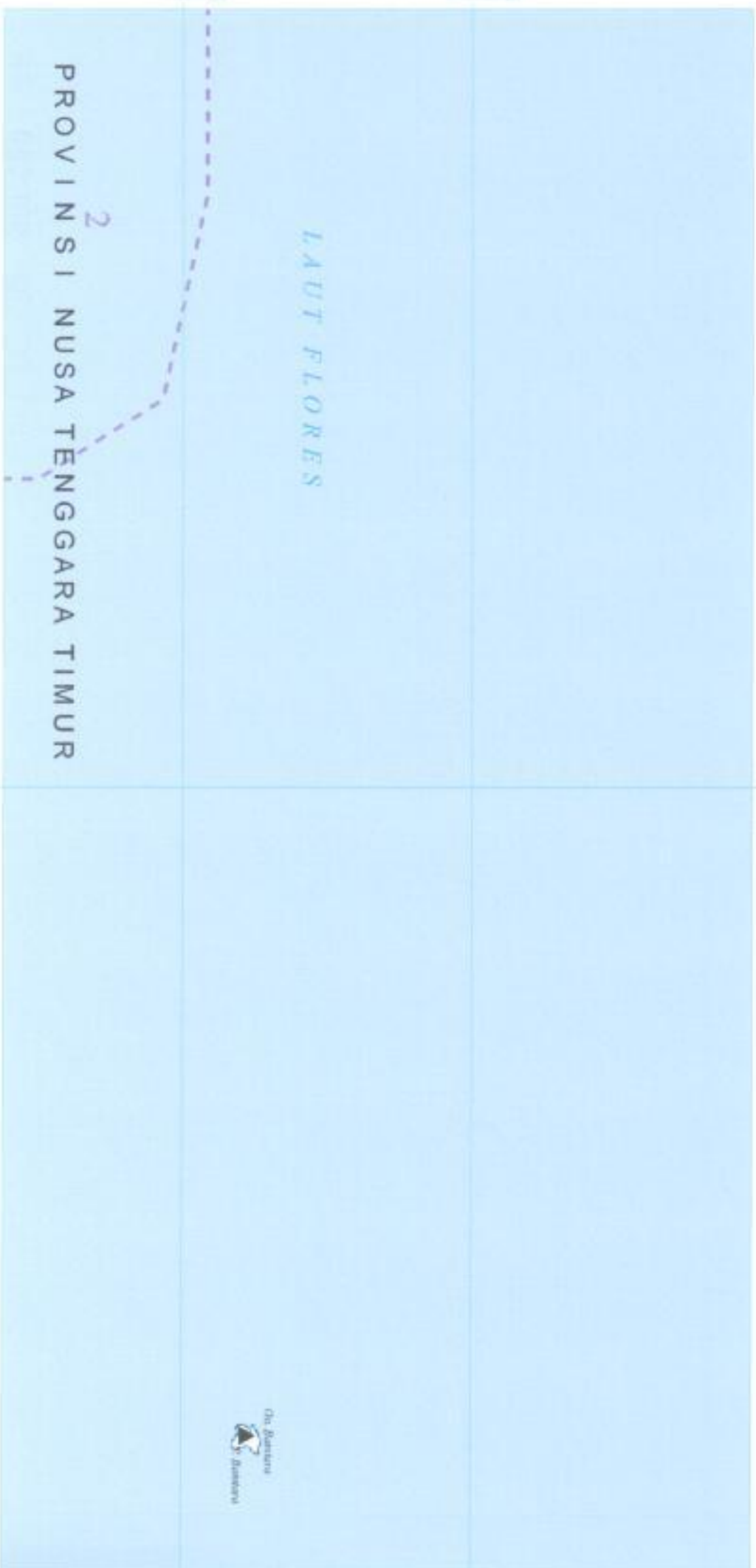
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 139 - I





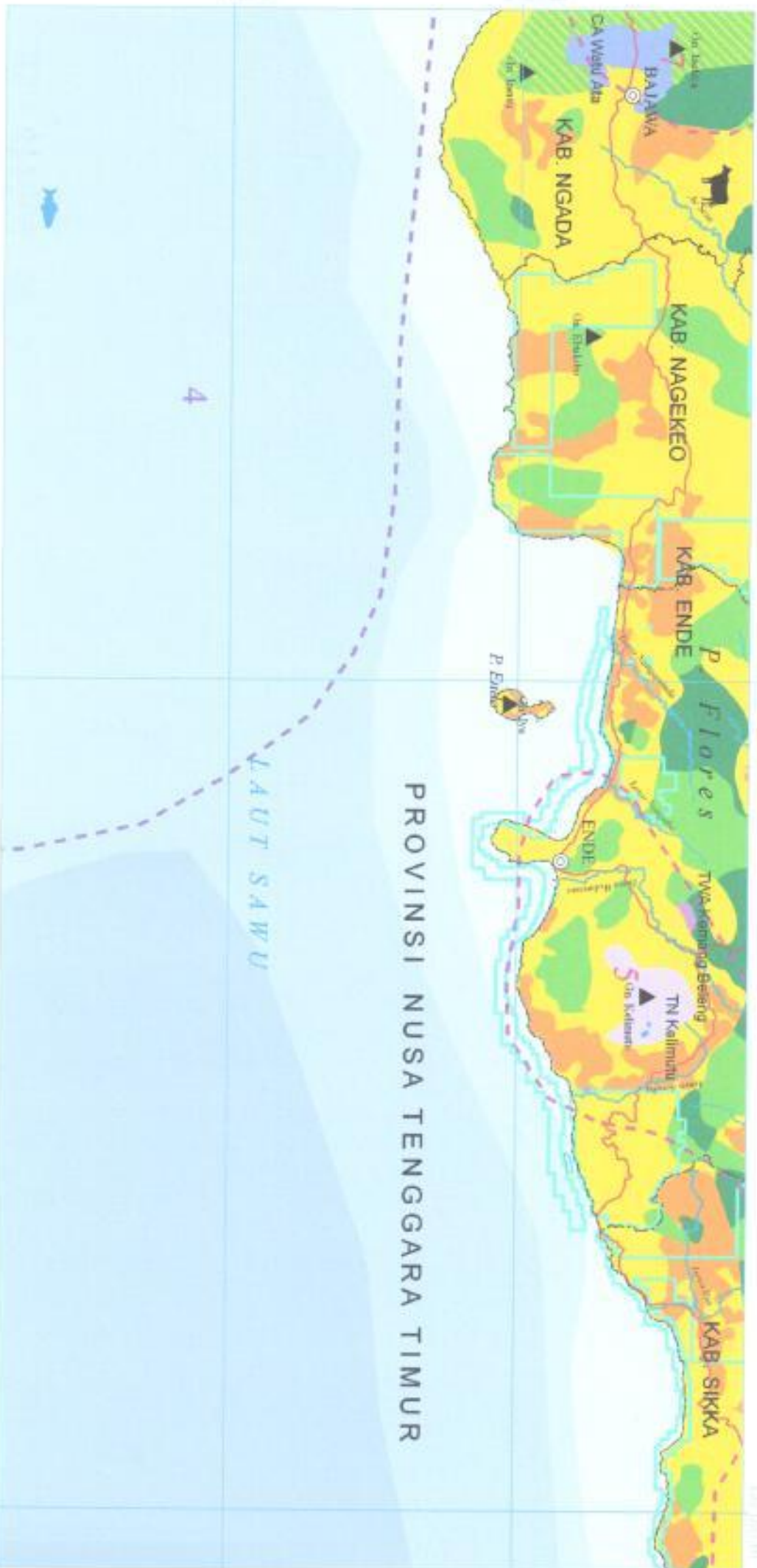
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 139 - 2





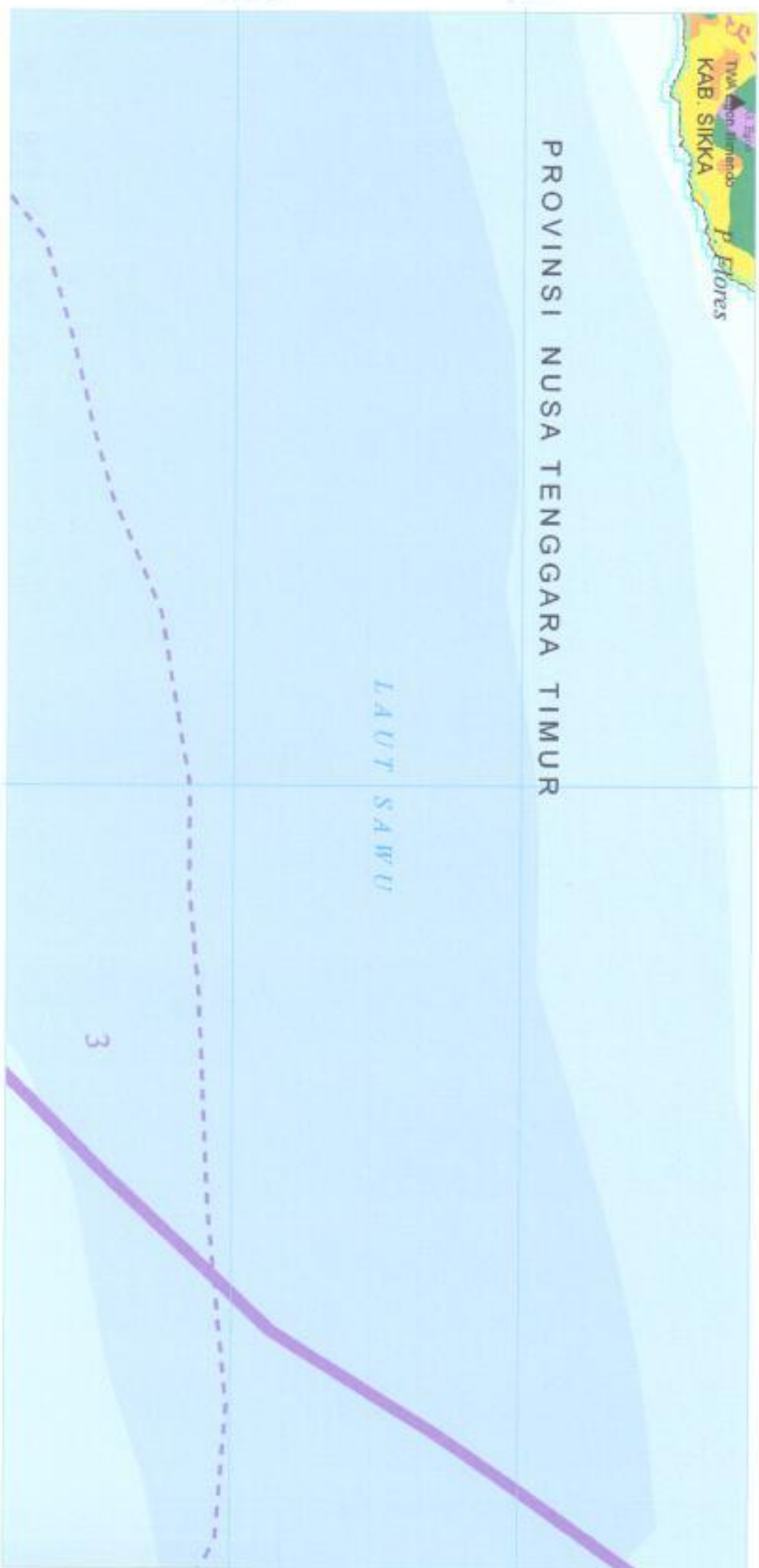
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 140 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 140 - 2





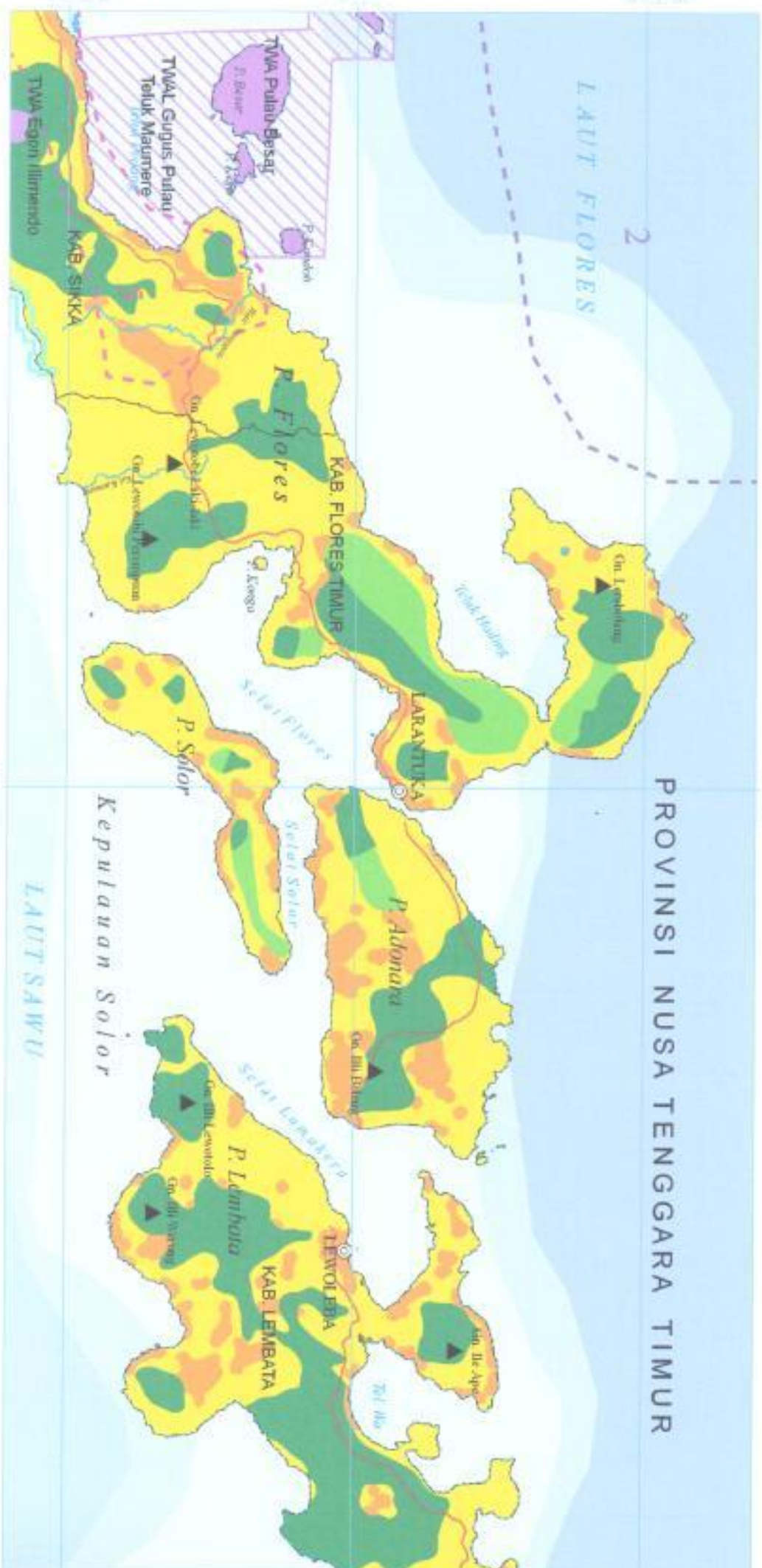
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 140 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 140 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 141 - 1

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LALU LAKSI

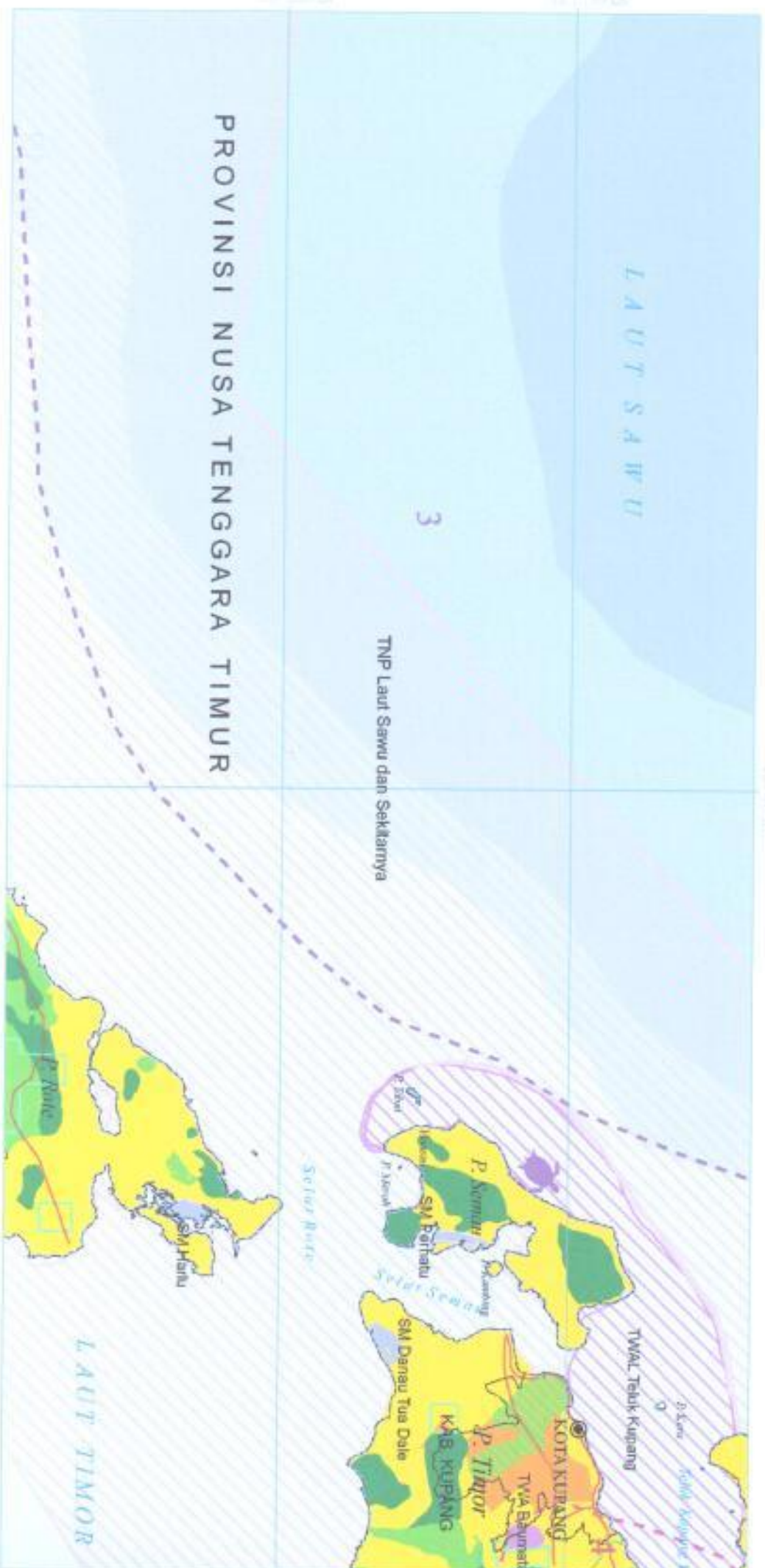
TNP Laut Sawu dan Sekitarnya

P. Bengina





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 141 - 2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 141 - 3

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAUT SAWU

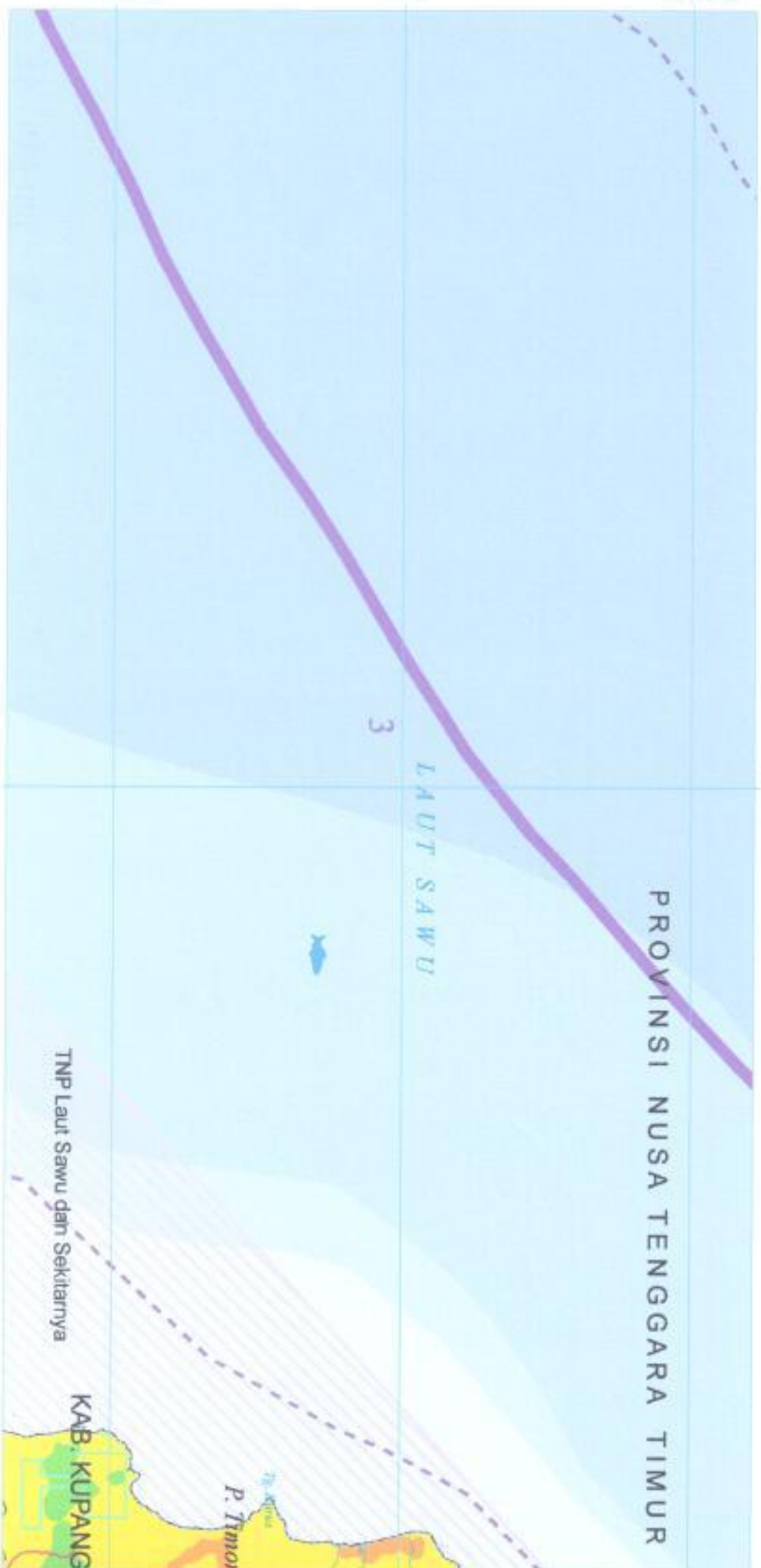
4

3

TNP Laut Sawu dan Sekitarnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 141 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 142 - 3

TNP Laut Sawu dan Sekitarnya

P. Luwu

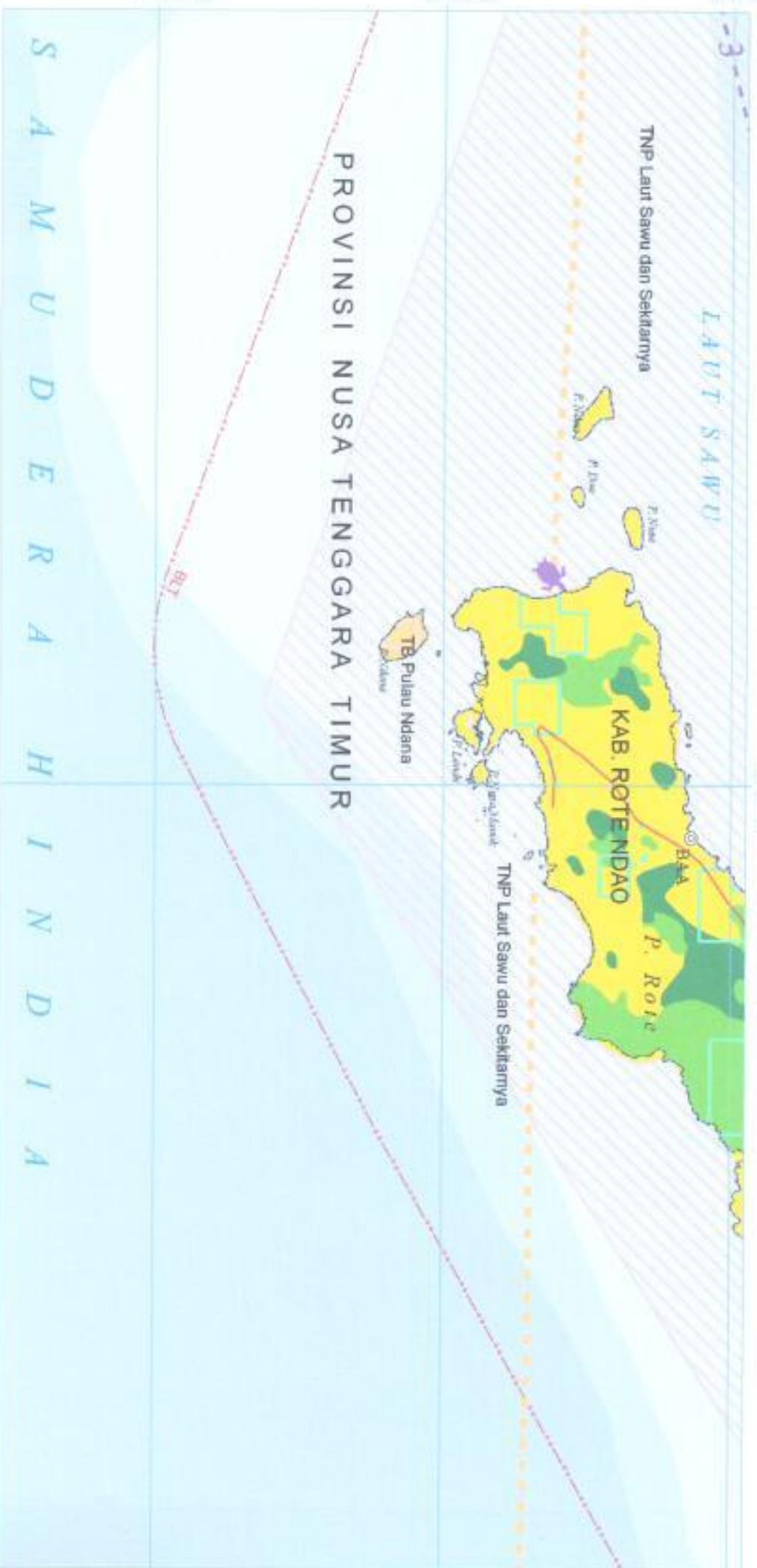
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SLT

S A M U D E R A H I N D I A

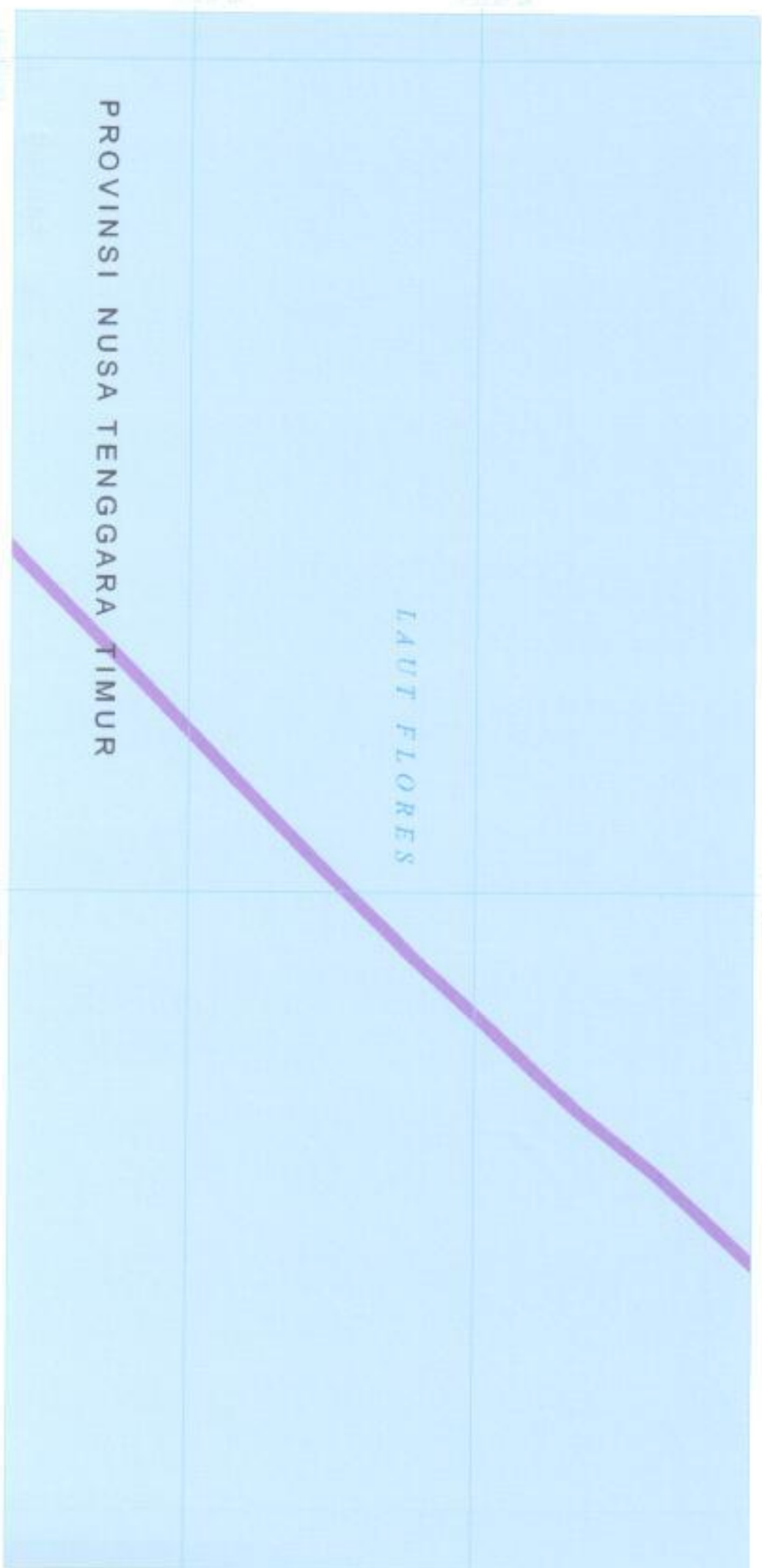


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 142 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 155 - 1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 156 - 1

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAUT SAWU

3

P. Rade

TNP Laut Sawu dan Sekitarnya

TIMOR LESTE

KAB. TIMOR TENGAH UTARA

P. Timor

ATAMBORA

KAB. BELU

TIMOR LESTE





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 156 - 2

TIMOR LESTE

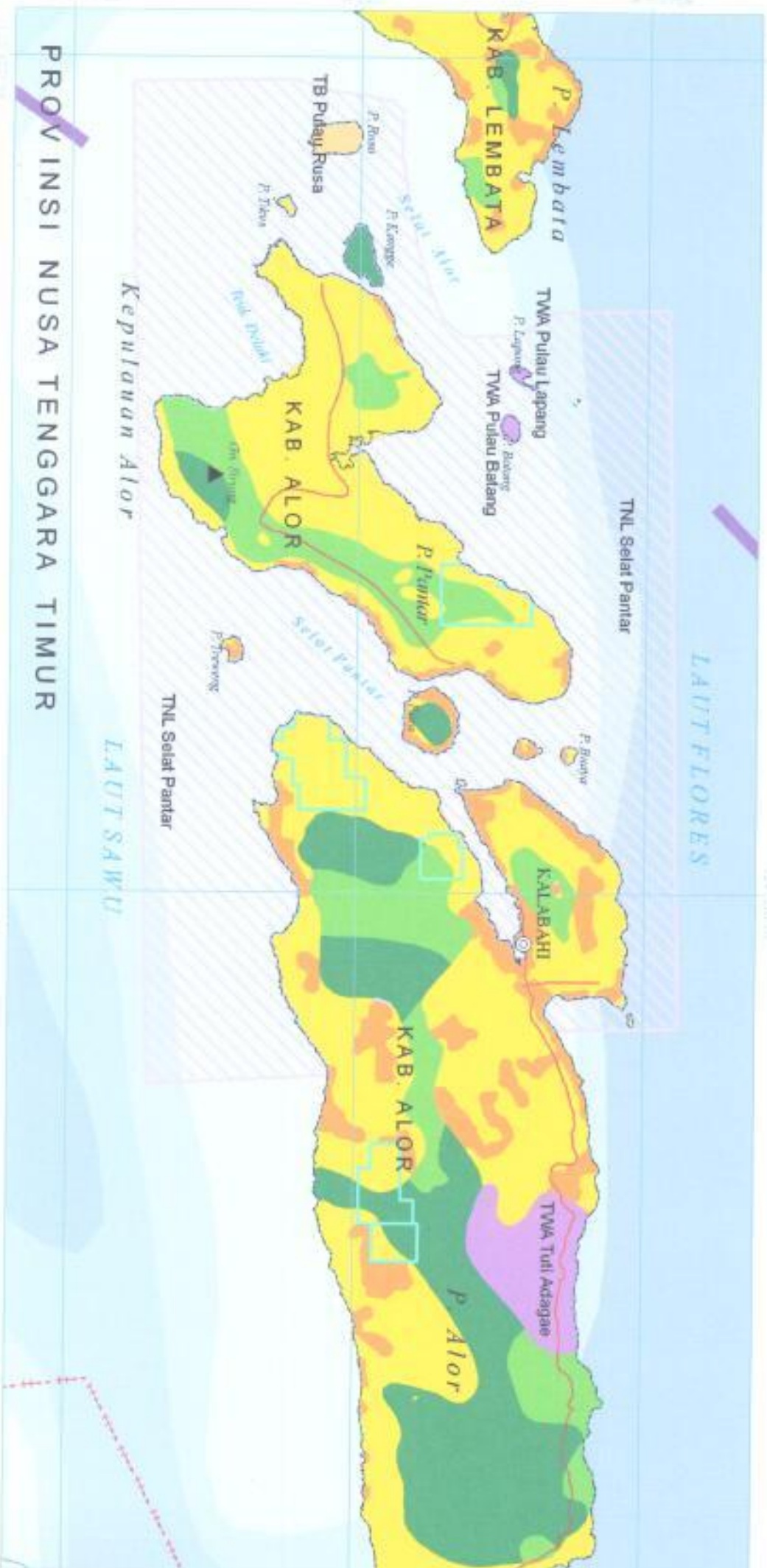
LAUT TIMOR

P. Timor
KAB. BELU



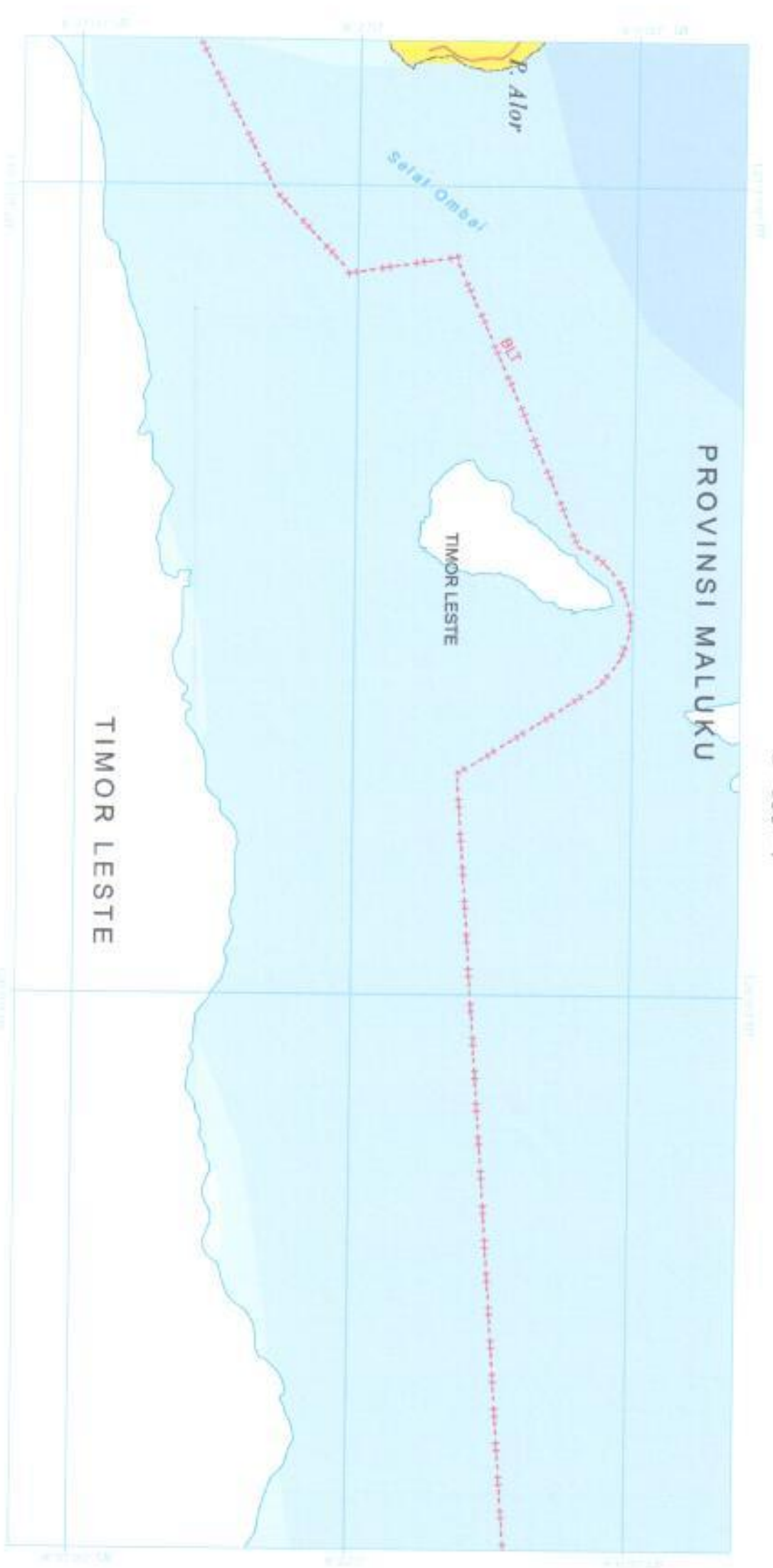
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 156 - 3





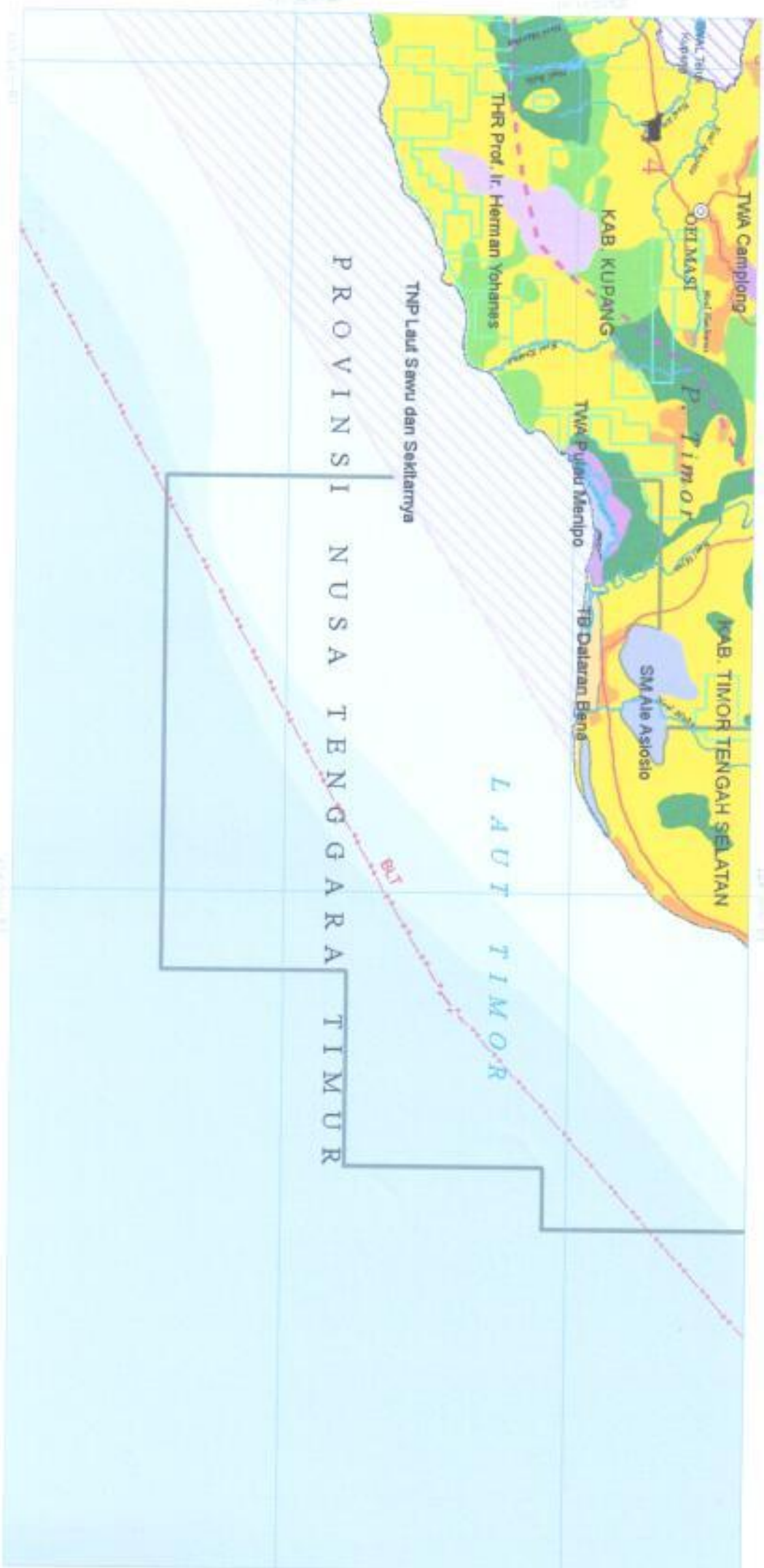
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 156 - 4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

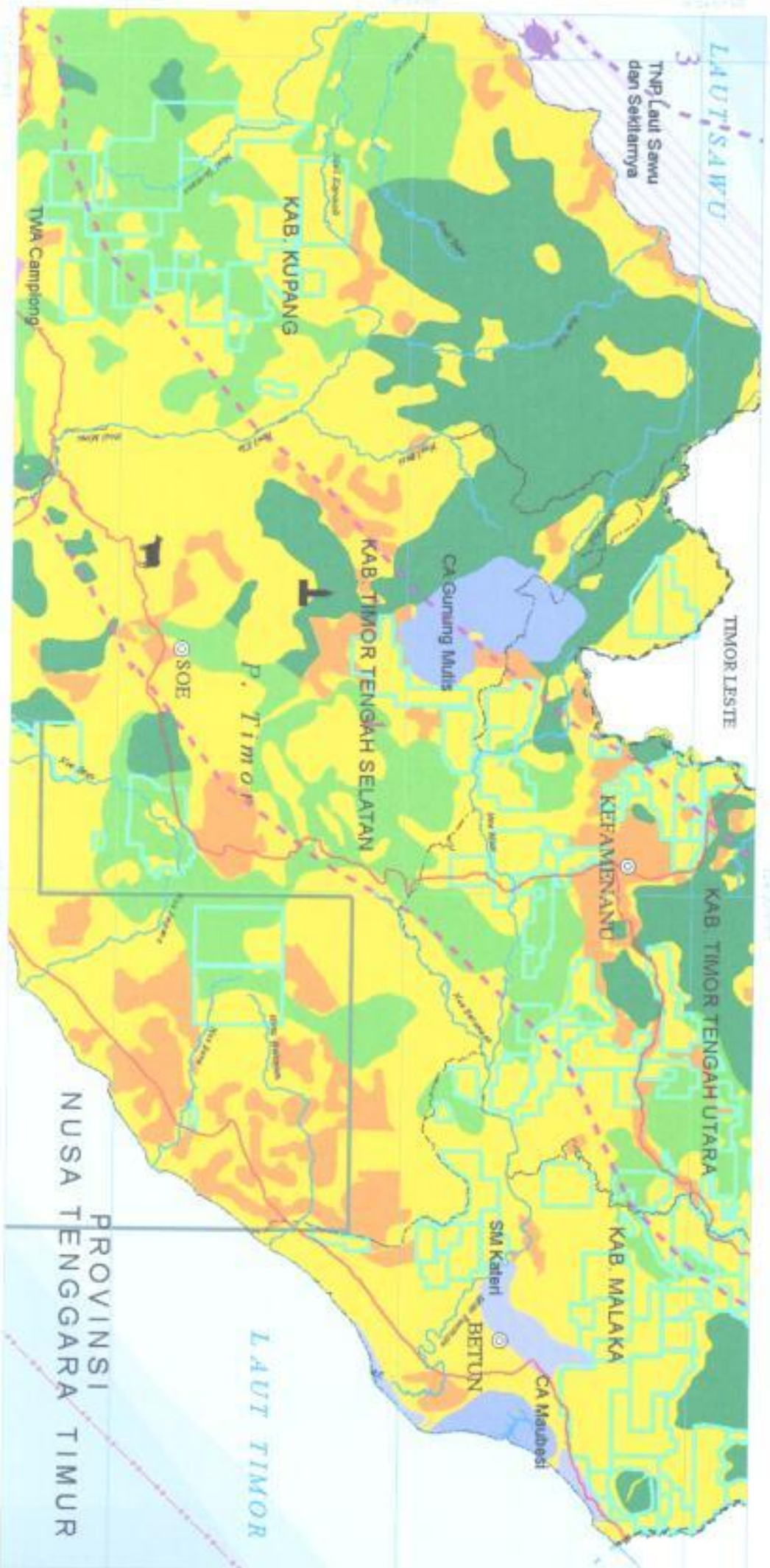
II - 157 - 1





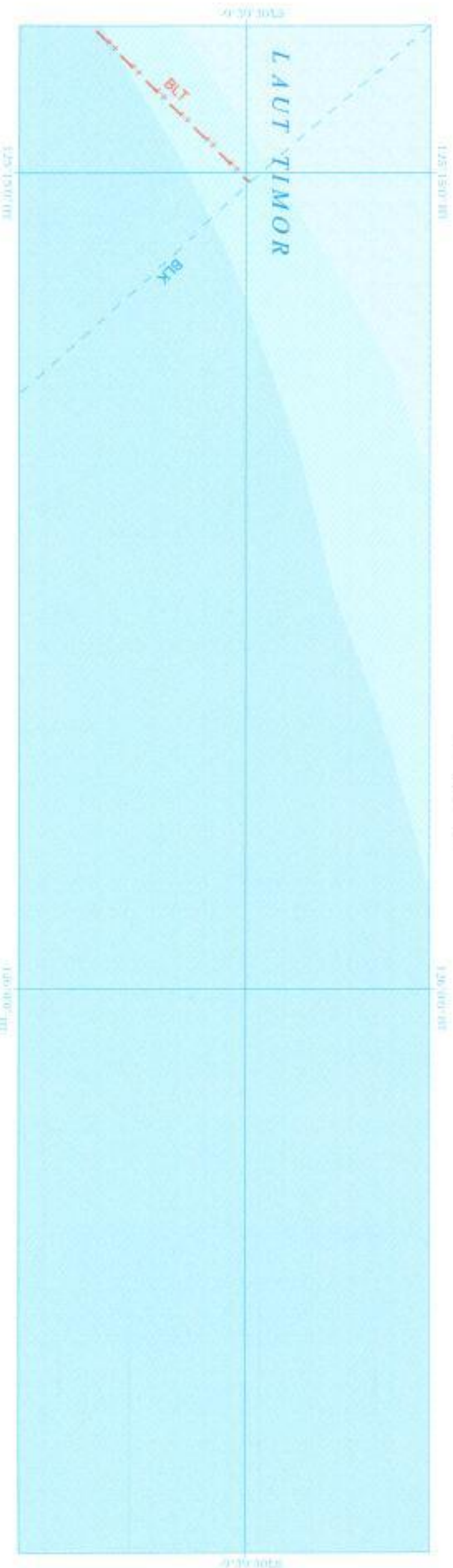
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 157 - 3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 157 - 4



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Retti Mardiaty